

POHON KINERJA 2023-2026
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA CIMAHI

VISI KOTA CIMAHI
Mewujudkan Cimahi Baru, Maju, Agamis dan Berbudaya

Kepala Pelaksana
Meningkatkan Ketahanan Bencana

Meningkatnya Ketahanan Bencana
1) Indeks Ketahanan Daerah (IKD)
2) Nilai Reformasi Birokrasi SKPD

**Meningkatnya Kualitas Pengelolaan
Pemerintah Daerah**
1) Nilai AKIP
2) Nilai Rata-rata IKM Kota
3) Indeks Profesionalisme ASN

**Meningkatkan Ketahanan Bencana Melalui
Koordinasi dan Kolaborasi Penanggulangan
Bencana Dengan Konsep Pentahelix Pada
Tahap Pra Bencana, Tahap Darurat Bencana
Dan Tahap Pasca Bencana**

**Meningkatkan Kualitas dan Inovasi
Pelayanan Publik**

**Kepala Seksi
Pencegahan dan
Kesiapsiagaan**
1. Persentase (%)
Pelayanan informasi
kebencanaan di
kawasan rawan
bencana
2. Persentase (%)
Pelayanan
Pencegahan dan
Kesiapsiagaan
terhadap bencana

**Kepala Seksi
Kedaruratan dan
Logistik**
Persentase (%)
Pelayanan
Penyelamatan dan
Evakuasi Korban
Bencana

**Kepala Seksi
Kedaruratan dan
Logistik**
Persentase (%)
penyelesaian dokumen
sampai dinyatakan
sah/legal

Sekretaris
1. Indeks
Profesionalisme ASN
2. Nilai IKM Perangkat
Daerah
3. Nilai AKIP Perangkat
Daerah

**S1
BPBD**

**S2
Seksi / Sub
Bagian**

**S3
Anggota &
Staff**

RPJMD

RENSTRA

Sasaran Program

Analisis Mitigasi Bencana		Analisis Bencana			Analisis Penanggulangan Krisis	Analisis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	Analisis Rencana Program dan Kegiatan		Analisis Pengembangan SDM Aparatur	Bendahara	Pengadministrasiasi Umum	Pengelola Barang Milik Daerah	
Tersedianya Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Tersedianya Pelayanan Pencegahan Dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Tersedianya pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Tersedianya pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Tersedianya Dokumen Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Tersedianya Dokumen Pasca Bencana	Tersusunnya dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan kinerja perangkat daerah	Tersedianya pelayanan umum kepegawaian, pengadaan dan pemeliharaan barang milik daerah	Tersedianya dokumen perencanaan, dan penganggaran PD	Tersedianya dokumen perencanaan, penganggaran, evaluasi kinerja PD dan tersedianya laporan administrasi keuangan PD	Tersedianya dokumen administrasi kepegawaian	Tersedianya laporan administrasi keuangan PD	Tersedianya dokumen penatausahaa n arsip PD	Tersedianya laporan administrasi barang milik daerah
1. Jumlah pengelolaan sistem data dan informasi 2. Jumlah sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi rawan bencana kepada masyarakat per jenis ancaman bencana	1. Jumlah laporan koordinasi penyusunan dokumen data atau informasi tentang rencana penanggulangan bencana 2. Jumlah laporan kegiatan pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana pada aparatur dan warga yang berada di Kawasan rawan bencana 3. Jumlah laporan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam pencegahan dan kesiapsiagaan pada saat pra bencana 4. Jumlah laporan konsep pamantauan, evaluasi dan pelaporan tentang pelaksanaan kegiatan pencegahan dan kesiapsiagaan pada saat pra bencana 5. Jumlah laporan konsep penyusunan telaahan staf dalam pencegahan dan kesiapsiagaan bencana 6. Jumlah laporan mitigasi bencana 7. Jumlah laporan evaluasi pemetaan daerah rawan bencana 8. Jumlah laporan monitoring dan evaluasi potensi bencana 9. Jumlah laporan konsep pertanggungjawaban kegiatan	Jumlah Laporan pengelolaan, penyediaan peralatan bencana	1. Jumlah laporan kegiatan tanggap darurat bencana 2. Jumlah Laporan pengelolaan, penyediaan logistik bencana 3. Jumlah hasil analisis bencana 4. Jumlah Laporan kejadian bencana 5. Jumlah konsep telaahan staf	Jumlah Dokumen data dan informasi bencana	1. Jumlah Laporan Koordinasi monitoring dan evaluasi 2. Jumlah Laporan kerusakan dan kerugian pasca bencana 3. Jumlah Analisa Pengelolaan Data dan Informasi Pasca Bencana 4. Jumlah Konsep telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan dalam pasca bencana	1. Jumlah dokumen rencana kerja 2. Jumlah Dokumen LPPD dan LKPJ 3. Jumlah Dokumen LKIP 4. Jumlah laporan capaian kinerja SKPD 5. Jumlah laporan program kerja dinas 6. Jumlah laporan bahan persentase pimpinan 7. Jumlah laporan kinerja dinas 8. Jumlah Dokumen RKA 9. Jumlah dokumen DPA 10. Kegiatan input RUP 11. Kegiatan koordinasi proses pemilihan penyedia barang/jasa 12. Laporan penyusunan bahan publikasi 13. Jumlah laporan monitoring dan evaluasi perangkat daerah 14. Jumlah laporan Standar Pelayanan Minimum 15. Jumlah laporan bahan kebijakan teknis RPJP/RKPD 16. Kegiatan pengumpulan dokumen SPIP 17. Kegiatan pengumpulan dokumen PMPRB (Akuntabilitas Kinerja PD)	1. Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 2. Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan 3. Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 4. Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 5. Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 6. Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD 7. Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 8. Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 9. Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 10. Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 11. Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 12. Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 13. Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1. Jumlah dokumen rencana kerja 2. Jumlah Dokumen LPPD dan LKPJ 3. Jumlah Dokumen LKIP 4. Jumlah dokumen RKA 5. Jumlah dokumen RKA perubahan 6. Jumlah dokumen DPA 7. Jumlah dokumen DPA Perubahan 8. Jumlah dokumen rencana kerja tahunan 9. Jumlah dokumen standar pelayanan PD 10. Jumlah dokumen survei kepuasan masyarakat 11. Jumlah laporan pendukung pertanggungjawab an Pj. WaliKota bidang kebencanaan 12. Jumlah laporan realisasi fisik dan keuangan 13. Jumlah laporan Pengukuran kinerja kegiatan 14. Jumlah laporan bahan kebijakan teknis RPJP/RKPD 15. Kegiatan input SAKIP 16. Jumlah dokumen perjanjian kinerja 17. Jumlah Dokumen Rencana Aksi 18. Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Rencana Aksi 19. Kegiatan pengumpulan dokumen PMPRB (Akuntabilitas Kinerja PD)	1. Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2. Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 3. Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 4. Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD	1. Jumlah Usulan kenaikan pangkat pegawai 2. Jumlah usulan gaji berkala pegawai 3. Jumlah usulan cuti pegawai 4. Jumlah Daftar urut kepangkatan 5. Jumlah daftar nominatif pegawai 6. Jumlah daftar verifikasi kehadiran pegawai 7. Jumlah verisikasi produktifitas ASN 8. Jumlah rekap dokumentasi apel pagi bulanan 9. Jumlah dokumen kendali gaji berkala 10. Jumlah rekap kebutuhan pegawai 11. Jumlah dokumen SPTJM 12. Jumlah dokumen SKP tahunan pegawai 13. Jumlah dokumen fasilitasi TASPEN, Karsu/Karis dan administrasi kepegawaian lainnya 14. Jumlah dokumen arsip daftar penilaian prestasi kerja pegawai 15. Jumlah usulan tunjangan keluarga, Askes, Taspen, Taperum, Pensiun 16. Jumlah Administrasi kepegawaian lainnya	1. Jumlah SPP Uang Persediaan (UP) 2. Jumlah SPP Ganti Uang (GU) 3. Jumlah SPP Tambah Uang (TU) 4. Jumlah SPP LS 5. LPJ Pengeluaran 6. Jumlah Surat pertanggungj awaban fungsional 7. Jumlah SP2D BP 8. Jumlah Buku Kas Umum 9. Jumlah buku pajak 10. Jumlah laporan keuangan bulanan 11. Jumlah laporan keuangan semesteran 12. Jumlah laporan keuangan tahunan	1. Jumlah register surat masuk 2. Jumlah register surat keluar 3. Jumlah arsip surat masuk 4. Jumlah arsip surat keluar 5. Jumlah distribusi surat 6. Jumlah Surat Keputusan 7. Jumlah register nota dinas 8. Jumlah register surat perintah tugas 9. Jumlah register surat perintah 10. Jumlah Arsip surat perintah 11. Jumlah arsip surat perintah tugas 12. Jumlah arsip nota dinas 13. Jumlah arsip dokumen penting lainnya	1. Jumlah laporan inventaris barang 2. Jumlah berita acara serah terima BMD 3. Jumlah berita acara pendistribusi an logistic 4. Jumlah laporan stock opname 5. Jumlah kartu inventaris barang 6. Jumlah kartu inventaris ruangan 7. Jumlah laporan mutasi barang 8. Jumlah laporan inventaris barang per ruangan 9. Jumlah pengadaan belanja modal